

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS INFRASTRUKTUR JALAN DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

SHAFFIRA MAHARANNIE PUTRI ARKIAN ARIEF

Infrastruktur jalan merupakan fasilitas publik yang berwujud sebagai layanan umum, yang berfungsi sebagai aksesibilitas yang menghubungkan antara daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Infrastruktur jalan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Namun, saat ini infrastruktur jalan di Provinsi Lampung menjadi topik pembahasan yang menarik di Indonesia. Mengingat kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Lampung yang rusak hingga menuai kritikan dari masyarakat. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana hak masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung? (2) bagaimana upaya pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan sumber data sekunder, serta tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengolahan data analisis kualitatif dan tabulasi, serta bentuk kesimpulan yang deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan (1) masyarakat memiliki hak dalam berpartisipasi, ikut berpendapat, dan mendapatkan ganti rugi atas kecelakaan akibat kerusakan dan kesalahan pembangunan infrastruktur jalan. Namun pemerintah masih kurang cepat dalam menanggapi pengaduan masyarakat atas infrastruktur jalan yang rusak, serta penetapan nilai ganti rugi yang tidak sesuai dengan kerugian masyarakat. (2) pemerintah telah berupaya dengan mengalokasikan anggaran perbaikan infrastruktur jalan, melakukan pada 72 ruas perbaikan infrastruktur jalan, menetapkan target kemandapan jalan. Namun, kurangnya anggaran dan SDM yang memadai, serta pengawasan dan partisipasi masyarakat yang masih kurang menjadi faktor penghambat upaya pemerintah. Maka penting untuk pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan SDM, dan meningkatkan pengawasan. Sehingga masyarakat akan memperoleh hak mereka, serta terhindarnya kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Infrastruktur Jalan, Pemenuhan Hak, dan Provinsi Lampung.

ABSTRACT

FULFILLMENT OF COMMUNITY RIGHTS TO ROAD INFRASTRUCTURE IN LAMPUNG PROVINCE

By

SHAFFIRA MAHARANNIE PUTRI ARKIAN ARIEF

Road infrastructure is a public facility in the form of a public service, which functions as accessibility that connects regions and improves the community's economy. Road infrastructure itself is regulated in Law Number 2 of 2022 concerning Roads. However, currently road infrastructure in Lampung Province is an interesting topic of discussion in Indonesia. Considering the damaged condition of road infrastructure in Lampung Province, it has attracted criticism from the public. The problems that will be examined in this research are (1) what are the community's rights to road infrastructure in Lampung Province? (2) what are the government's efforts to fulfill people's rights to road infrastructure in Lampung Province. This research uses normative legal research methods, with secondary data sources, as well as qualitative research types with statutory and conceptual approaches. Data processing, qualitative analysis and tabulation, as well as deductive conclusions. The results of the research show (1) the community has the right to participate, share opinions, and receive compensation for accidents resulting from damage and errors in road infrastructure construction. However, the government is still not quick enough to respond to public complaints regarding damaged road infrastructure, as well as determining compensation amounts that do not correspond to community losses. (2) the government has made efforts by allocating a budget for road infrastructure repairs, carrying out 72 sections of road infrastructure repairs, and setting targets for road stability. However, the lack of adequate budget and human resources, as well as inadequate community supervision and participation are factors hampering the government's efforts. So it is important for the government to increase community participation, improve human resources, and improve supervision. So that people will get their rights, and avoid inadequate road infrastructure conditions in Lampung Province.

Keywords: Road Infrastructure, Fulfillment of Rights, and Lampung Province.